

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP-116/BC/2025

TENTANG

PENETAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP
KEDUAPULUHSATU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 meliputi Layanan Impor, Layanan Ekspor, Layanan Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Layanan Pusat Logistik Berikat (PLB), Layanan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas/Free Trade Zone (FTZ), Layanan Voluntary Declaration, Layanan Perijinan Prinsip, Layanan Perbendaharaan, Layanan Manifes, Layanan Barang Kiriman, dan Layanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
 - b. bahwa terhadap CEISA 4.0 Layanan Perbendaharaan, Layanan SAPABANKUM, Layanan Cukai, Layanan Barang Pindahan dan Layanan Perizinan Transaksional telah dilakukan uji coba (piloting) pada Kantor Bea dan Cukai;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam mengimplementasikan CEISA 4.0 diperlukan ketentuan yang menetapkan mengenai penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0;
 - d. bahwa telah dilakukan evaluasi pelaksanaan uji coba (Piloting) terhadap Kantor Bea dan Cukai secara bertahap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-88/BC/2021 Tentang Pelaksanaan Piloting Implementasi CEISA 4.0, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-124/BC/2022 tentang Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Implementasi CEISA 4.0, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-218/BC/2022 tentang Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Implementasi CEISA 4.0 Layanan Perbendaharaan Menu Jaminan dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-87/BC/2023 tentang Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Implementasi CEISA 4.0;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Keduapuluhsatu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.04/2006 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1671);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola Teknologi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 988) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.04/2022 Tentang Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai;
 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-15/BC/2018 Tentang Tata Laksana Upaya dan Bantuan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2023 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol;

9. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-19/BC/2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2022 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Ketentuan Kepabeanan Atas Impor Barang Pindahan;
11. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-30/BC/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 7/BC/2021 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Tempat Penimbunan Berikat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK.04/2020 tentang Pembongkaran Dan Penimbunan Barang Impor;
13. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2023 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.04/2015 tentang Penundaan Pembayaran Bea Masuk dalam Rangka Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Jaminan;
15. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2016 tentang Tata Cara Pemberian Penundaan, Pemberian Perpanjangan Penundaan Dan Penyelesaian Penundaan Pembayaran Bea Masuk, Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor, Atau Bea Masuk, Cukai Dan Pajak Dalam Rangka Impor Karena Menunggu Keputusan Pembebasan Atau Keringanan;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.04/2014 tentang Impor Sementara dengan Menggunakan Carnet atau Ekspor yang Dimaksudkan untuk Diimpor Kembali dalam Jangka Waktu Tertentu dengan Menggunakan Carnet;
17. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-09/BC/2015 Tentang Tata Kerja Impor Sementara Dengan Menggunakan Carnet Atau Ekspor Yang Dimaksudkan Untuk Diimpor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan Carnet;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.04/2021 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Kembali Barang yang telah Diekspor;
19. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-04/BC/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor;

20. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2018 tentang Pelayanan Penyampaian Pemberitahuan Kepabeanan Dan/Atau Pemberitahuan Cukai Dalam Keadaan Kahar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2023 tentang Tata Laksana Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
21. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-139/BC/2022 Tentang Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Pertama sampai dengan Tahap Keduapuluh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KEDUAPULUHSATU.

KESATU : Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

1. Penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 adalah rangkaian kegiatan untuk menerapkan atau mengoperasikan aplikasi CEISA 4.0 dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses infrastruktur dan teknologi CEISA 4.0 secara penuh pada Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan.
2. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Wilayah/Kantor Wilayah Khusus, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

KEDUA : Menetapkan penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 pada Kantor Bea dan Cukai dengan jenis layanan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

KETIGA : Penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan dengan mengikutsertakan Pengguna Jasa terkait, dan Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Memerintahkan Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 melalui koordinasi dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

- KELIMA : Memerintahkan Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk menugaskan Pejabat dan/atau Pegawai melakukan koordinasi penyelesaian masalah yang ditemukan dan evaluasi terhadap layanan selama penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 bersama dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- KEENAM : Dalam hal terjadi kendala yang mengakibatkan CEISA 4.0 mengalami kondisi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) tidak normal, layanan dapat dilakukan dengan menggunakan CEISA, aplikasi pendukung atau metode lain sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Tata Laksana Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 pada Kantor Bea dan Cukai yang ditunjuk mulai berlaku pada tanggal yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2025.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

- a. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
- d. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2025

Plh. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ANGGITO ABIMANYU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-116/BC/2025
TENTANG
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA
4.0 TAHAP KEDUAPULUHSATU

**DAFTAR KANTOR BEA DAN CUKAI YANG DITETAPKAN
MELAKUKAN PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0
TAHAP KEDUAPULUHSATU**

**DAFTAR KANTOR
YANG DITETAPKAN MELAKUKAN PELAKSANAAN MANDATORI CEISA 4.0
LAYANAN PERBENDAHARAAN DAN SAPABANKUM (TANGGAL 30 JUNI 2025)**

NO	KANTOR	LAYANAN
1	DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
2	DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
3	KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
4	KPUBC TIPE B BATAM	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
5	KPUBC TIPE C SOEKARNO-HATTA	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
6	KANWIL DJBC ACEH	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
7	KPPBC TMP C SABANG	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
8	KPPBC TMP C BANDA ACEH	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
9	KPPBC TMP C MEULABOH	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN)

		SAPABANKUM
10	KPPBC TMP C LHOKSEUMAWE	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
11	KPPBC TMP C LANGSA	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
12	KANWIL DJBC SUMATERA UTARA	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
13	KPPBC TMP BELAWAN	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
14	KPPBC TMP B MEDAN	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
15	KPPBC TMP B KUALANAMU	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
16	KPPBC TMP C PEMATANGSIANTAR	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
17	KPPBC TMP C SIBOLGA	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
18	KPPBC TMP C TELUK NIBUNG	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
19	KPPBC TMP C KUALA TANJUNG	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
20	KANWIL DJBC RIAU	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
21	KPPBC TMP B PEKANBARU	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
22	KPPBC TMP B DUMAI	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
23	KPPBC TMP B TELUK BAYUR	PERBENDAHARAAN

		(PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
24	KPPBC TMP C TEMBILAHAN	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
25	KPPBC TMP C BENGKALIS	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
26	KANWIL DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
27	KPPBC TMP B TANJUNG BALAI KARIMUN	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
28	KPPBC TMP B TANJUNG PINANG	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
29	KANWIL DJBC SUMATERA BAGIAN TIMUR	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
30	KPPBC TMP B PALEMBANG	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
31	KPPBC TMP B JAMBI	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
32	KPPBC TMP C PANGKALPINANG	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
33	KPPBC TMP C TANJUNGPANDAN	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
34	KANWIL DJBC SUMATERA BAGIAN BARAT	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
35	KPPBC TMP B BANDAR LAMPUNG	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
36	KPPBC TMP C BENGKULU	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
37	KANWIL DJBC BANTEN	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
38	KPPBC TMP MERAK	PERBENDAHARAAN

		(PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
39	KPPBC TMP A TANGERANG	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
40	KANWIL DJBC JAKARTA	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
41	KPPBC TMP CIKARANG	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
42	KPPBC TMP A MARUNDA	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
43	KPPBC TMP A BEKASI	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
44	KPPBC TMP A JAKARTA	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
45	KPPBC TMP C KANTOR POS PASAR BARU	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
46	KANWIL DJBC JAWA BARAT	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
47	KPPBC TMP A BOGOR	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
48	KPPBC TMP A PURWAKARTA	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
49	KPPBC TMP A BANDUNG	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
50	KPPBC TMP C CIREBON	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
51	KPPBC TMP C TASIKMALAYA	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
52	KANWIL DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
53	KPPBC TMP TANJUNG EMAS	PERBENDAHARAAN

		(PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
54	KPPBC TMC KUDUS	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
55	KPPBC TMP A SEMARANG	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
56	KPPBC TMP B SURAKARTA	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
57	KPPBC TMP B YOGYAKARTA	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
58	KPPBC TMP C CILACAP	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
59	KPPBC TMP C PURWOKERTO	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
60	KPPBC TMP C TEGAL	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
61	KPPBC TMP C MAGELANG	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
62	KANWIL DJBC JAWA TIMUR I	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
63	KPPBC TMP TANJUNG PERAK	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
64	KPPBC TMP JUANDA	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
65	KPPBC TMP A PASURUAN	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
66	KPPBC TMP B GRESIK	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
67	KPPBC TMP B SIDOARJO	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
68	KPPBC TMP C MADURA	PERBENDAHARAAN

		(PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
69	KPPBC TMP C BOJONEGORO	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
70	KANWIL DJBC JAWA TIMUR II	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
71	KPPBC TMC MALANG	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
72	KPPBC TMC KEDIRI	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
73	KPPBC TMP C BLITAR	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
74	KPPBC TMP C MADIUN	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
75	KPPBC TMP C JEMBER	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
76	KPPBC TMP C BANYUWANGI	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
77	KPPBC TMP C PROBOLINGGO	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
78	KANWIL DJBC BALI, NTB DAN NTT	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
79	KPPBC TMP NGURAH RAI	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
80	KPPBC TMP A DENPASAR	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
81	KPPBC TMP B ATAMBUA	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
82	KPPBC TMP C MATARAM	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
83	KPPBC TMP C KUPANG	PERBENDAHARAAN

		(PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
84	KPPBC TMP C SUMBAWA	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
85	KPPBC TMP C LABUAN BAJO	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
86	KANWIL DJBC KALIMANTAN BAGIAN BARAT	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
87	KPPBC TMP B PONTIANAK	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
88	KPPBC TMP C ENTIKONG	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
89	KPPBC TMP C SINTETE	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
90	KPPBC TMP C NANGA BADAU	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
91	KPPBC TMP C KETAPANG	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
92	KPPBC TMP C JAGOI BABANG	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
93	KANWIL DJBC KALIMANTAN BAGIAN SELATAN	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
94	KPPBC TMP B BANJARMASIN	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
95	KPPBC TMP C SAMPIT	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
96	KPPBC TMP C PANGKALAN BUN	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
97	KPPBC TMP C KOTABARU	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
98	KPPBC TMP C PALANGKARAYA	PERBENDAHARAAN

		(PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
99	KANWIL DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
100	KPPBC TMP B BALIKPAPAN	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
101	KPPBC TMP B SAMARINDA	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
102	KPPBC TMP C BONTANG	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
103	KPPBC TMP C TARAkan	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
104	KPPBC TMP C NUNUKAN	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
105	KPPBC TMP C SANGATTA	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
106	KANWIL DJBC SULAWESI BAGIAN SELATAN	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
107	KPPBC TMP B MAKASSAR	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
108	KPPBC TMP C PAREPARE	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
109	KPPBC TMP C MALILI	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
110	KPPBC TMP C KENDARI	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
111	KANWIL DJBC SULAWESI BAGIAN UTARA	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
112	KPPBC TMP C PANTOLOAN	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
113	KPPBC TMP C MOROWALI	PERBENDAHARAAN

		(PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
114	KPPBC TMP C LUWUK	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
115	KPPBC TMP C BITUNG	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
116	KPPBC TMP C MANADO	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
117	KPPBC TMP C GORONTALO	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
118	KANWIL DJBC MALUKU	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
119	KPPBC TMP C AMBON	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
120	KPPBC TMP C TUAL	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
121	KPPBC TMP C TERNATE	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
122	KANWIL DJBC KHUSUS PAPUA	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
123	KPPBC TMP C SORONG	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
124	KPPBC TMP C MANOKWARI	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
125	KPPBC TMP C JAYAPURA	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
126	KPPBC TMP C BIAK	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
127	KPPBC TMP C FAKFAK	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
128	KPPBC TMP C TIMIKA	PERBENDAHARAAN

		(PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM
129	KPPBC TMP C MERAUKE	PERBENDAHARAAN (PENUNDAAN/PENGANGSURAN DAN PENGEMBALIAN) SAPABANKUM

**DAFTAR KANTOR
YANG DITETAPKAN MELAKUKAN PELAKSANAAN MANDATORI CEISA 4.0
LAYANAN CUKAI (TANGGAL 30 JUNI 2025)**

NO	KANTOR	LAYANAN
1	KPPBC TMP B SURAKARTA	CUKAI (PELUNASAN, PRODUKSI, PEMBEBASAN, DAN PERDAGANGAN)
2	KPPBC TMP B YOGYAKARTA	CUKAI (PELUNASAN, PRODUKSI, PEMBEBASAN, DAN PERDAGANGAN)

**DAFTAR KANTOR
YANG DITETAPKAN MELAKUKAN PELAKSANAAN MANDATORI CEISA 4.0
LAYANAN BARANG PINDAHAN (TANGGAL 27 JUNI 2025)**

NO	KANTOR	LAYANAN
1	KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	BARANG PINDAHAN
2	KPUBC TIPE C SOEKARNO-HATTA	BARANG PINDAHAN
3	KPPBC TMP BELAWAN	BARANG PINDAHAN
4	KPPBC TMP TANJUNG EMAS	BARANG PINDAHAN
5	KPPBC TMP TANJUNG PERAK	BARANG PINDAHAN
6	KPPBC TMP JUANDA	BARANG PINDAHAN
7	KPPBC TMP NGURAH RAI	BARANG PINDAHAN
8	KPPBC TMP A MARUNDA	BARANG PINDAHAN
9	KPPBC TMP B KUALANAMU	BARANG PINDAHAN
10	KPPBC TMP C KANTOR POS PASAR BARU	BARANG PINDAHAN
11	KPPBC TMP C SUMBAWA	BARANG PINDAHAN

**DAFTAR KANTOR
YANG DITETAPKAN MELAKUKAN PELAKSANAAN MANDATORI CEISA 4.0
LAYANAN PERIZINAN TRANSAKSIONAL TPB, PERIZINAN BONGKAR TIMBUN,
PERIZINAN KONSOLIDASI EKSPOR, VOORUITSLAG, CARNET, DAN RE-IMPOR
(TANGGAL 30 JUNI 2025)**

NO	KANTOR	LAYANAN
1	KPPBC TMP TANJUNG PERAK	PERIZINAN KONSOLIDASI EKSPOR, PERIZINAN BONGKAR TIMBUN, VOORUITSLAG, CARNET, DAN RE-IMPOR (SIREN)
2	KPPBC TMP TANJUNG EMAS	VOORUITSLAG, CARNET, DAN RE-IMPOR (SIREN)
3	KPPBC TMP JUANDA	VOORUITSLAG, CARNET, DAN RE-IMPOR (SIREN)
4	KPPBC TMP A MARUNDA	VOORUITSLAG, CARNET, DAN RE-IMPOR (SIREN)
5	KPPBC TMP C SUMBAWA	VOORUITSLAG, CARNET, DAN RE-IMPOR (SIREN)
6	KPPBC TMP A BANDUNG	PERIZINAN TRANSAKSIONAL TPB

Plh. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ANGGITO ABIMANYU